

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2008. *Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan STIM YKPN.
- Erlina, Rambe, dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Erina, dkk. 2020. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur*. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 05 No. 01.
- Fitriani. 2017. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai*. Dalam Jurnal EMOR Vol. 2 No. 1.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2013. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Raharjo dan Admojo. 2018. *Sistem Hukum Indonesia : Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Kema. 2013. *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Manado*. Dalam Jurnal EMBA Vol 1 No. 3.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Bogor.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, j, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nahrudin, Z. 2014. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru*. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 4 No. 2.

- Niu, dkk. 2014. *Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kotamobagu*. Dalam Jurnal EMBA Vo. 2 No. 4.
- Pasolong. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Putu, dkk. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. E- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 8 No. 2.
- Rachmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rahmadani. 2018. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 Tentang Laporan Keuangan Pemerintahan pada Pemerintah Kota Subulussalam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Shovia, dkk. 2020. *Analisis Penerapan PSAP No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada UPTD Puskesmas Gunung Pati Semarang*. Dalam Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan Vol. 3 No. 1.
- Sudaryati dan Permana. 2020. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruial pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur*. Dalam Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 5 No. 1.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti. 2008. *Penerapan PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Pernyataan No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Langkat Sumatera Utara*. Skripsi Minor Univeristas Sumatera Utara Medan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.